

**ANALISIS PEMETAAN MUTU (PERDIRJEN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMDIKBUD  
NO. 1 TAHUN 2016) LEMBAGA PAUD DI BP PAUD  
DAN DIKMAS SUMATERA UTARA  
(Studi Kasus Kota Medan)**

**TESIS**

OLEH

**INTAN PASARIBU  
NPM. 181801028**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Pemetaan Mutu (Perdirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud No. 1 Tahun 2016) Lembaga PAUD di BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan)**

**N a m a : Intan Pasaribu**

**N P M : 181801028**



**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Sihombing', written over the watermark.

**Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA**

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Kadir', written over the watermark.

**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Kadir', written over the watermark.

**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Direktur**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Kuswardani', written over the watermark.

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### ANALISIS PEMETAAN MUTU (PERDIRJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMDIKBUD NO. 1 TAHUN 2016) LEMBAGA PAUD DI BP PAUD DAN DIKMAS SUMATERA UTARA (Studi Kasus Kota Medan)

Oleh :

**Nama** : Intan Pasaribu  
**NPM** : 181801028  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
**Pembimbing II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pemetaan mutu satuan PAUD merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan lembaga PAUD menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini. Rumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan, 2) Bagaimana faktor kendala pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan oleh BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara belum dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil pemetaan tidak dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu lembaga PAUD. Faktor kendala pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan adalah: Koordinasi dalam tim inti cenderung berjalan dengan lambat dan kurang lancar, informasi yang dikumpulkan dari lapangan oleh tim pelaksana pemetaan mutu sering ditemukan kejanggalan-kejanggalan atas informasi, pembahasan terhadap hasil pemetaan mutu tidak selalu dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi lembaga PAUD, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dari hasil pemetaan mutu tidak selalu dapat dilakukan dengan baik karena setiap rekomendasi membutuhkan biaya untuk melaksanakannya.

**Kata Kunci:** Pemetaan Mutu, Pendidikan Anak Usia Dini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)21/8/23

## ABSTRACT

### **QUALITY MAPPING ANALYSIS (EARLY EDUCATION EDUCATION AND EDUCATION OF KEMDIKBUD COMMUNITY NO. 1 OF 2016) PAUD INSTITUTIONS IN BP PAUD AND DIKMAS SUMATERA UTARA (CASE STUDY OF MEDAN CITY)**

By :

**Name** : Intan Pasaribu  
**NPM** : 181801028  
**Study Program** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA  
**Supervisor II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

*Mapping the quality of PAUD units is an effort to determine the level of eligibility of PAUD institutions according to the National Education Standards (SNP). The results of the quality mapping are useful for formulating policies to develop the quality of early childhood education. The formulation of the problems proposed are: 1) How to map the quality of PAUD institutions in Medan City, 2) What are the obstacles to mapping the quality of PAUD institutions in Medan. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. The results of this study indicate that the quality mapping program of PAUD institutions in the city of Medan by BP PAUD and Dikmas North Sumatra has not been implemented properly, so that the mapping results cannot really be utilized as a basis for improving the quality of PAUD institutions. Obstacles to quality mapping of PAUD institutions in Medan City are: Coordination in the core team tends to run slowly and substandard, information collected from the field by the quality mapping implementation team is often found discrepancies in information, discussions on the results of quality mapping do not always produce recommendations to overcome obstacles faced by PAUD institutions, and follow-up on recommendations given from the results of quality mapping cannot always be done properly because each recommendation requires costs to implement it.*

*Keywords: Quality Mapping, Early Childhood Education*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)21/8/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kerangka Teori.....	7
2.1.1. Pemetaan Mutu.....	7
2.1.2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .....	14
2.1.3. Mutu Pendidikan .....	20
2.1.4. Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	30
2.2. Penelitian Terdahulu .....	33
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	37
3.2. Bentuk Penelitian .....	37
3.3. Informan Penelitian .....	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5. Teknik Analisis Data .....	39
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1. Sejarah Singkat BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara	43
4.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.....	45
4.1.3. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara .....	50
4.1.4. Sarana dan Prasarana .....	52
4.1.5. Landasan Hukum.....	53
4.2. Pembahasan .....	54
4.2.1. Pemetaan Mutu Lembaga PAUD di Kota Medan .....	54
4.2.2. Faktor Kendala Pemetaan Mutu Lembaga PAUD di Kota Medan.....	69

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Rekomendasi .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
-----------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting dalam pembangunan manusia karena dengan pendidikan maka akan dapat diwujudkan individu yang cerdas dan terampil untuk mengembangkan diri menjadi individu yang unggul dan memperoleh kesejahteraan hidup. Disamping itu, pembangunan nasional juga membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber-sumber ekonomi secara efisien dan efektif tanpa terlalu banyak melibatkan tenaga ahli dari negara asing. Terdapat paradigma bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan negara tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam berbagai bidang (sektor) pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spritual, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang mempunyai akal dan budi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara harus mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik sehingga kelak dapat berkontribusi secara maksimum dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Mujamil (2012:3), mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

meningkatkan kemampuan peserta didik. Dengan demikian mutu pendidikan mengacu pada kemampuan lembaga pendidikan dalam mengubah sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi lebih siap menghadapi tahap kehidupan selanjutnya.

Secara nasional mutu pendidikan diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang disebut dengan SNP (standar nasional pendidikan), yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Kedelapan standar mutu pendidikan tersebut membentuk rangkaian yang terpadu dalam menentukan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Untuk mencapai kedelapan standar pendidikan di atas, maka setiap lembaga pendidikan harus mengarahkan semua sumber dayanya secara optimal, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia atau sumber daya tenaga pendidik.

Salah satu jenis atau tingkat pendidikan yang sangat penting di tengah masyarakat adalah Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat dengan PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan pada masa dewasa.

Keberadaan PAUD sebagai pendidikan non formal khususnya di daerah perkotaan sudah menjadi hal yang umum, walaupun tidak semua anggota masyarakat menggunakannya karena tidak diwajibkan. Lembaga PAUD tersebar dimana-mana dengan karakteristik yang beragam sesuai dengan lingkungan masyarakat yang menjadi penggunaannya dan menawarkan berbagai fasilitas yang berbeda-beda. Pada kondisi yang sangat beragam tersebut pemerintah berkepentingan untuk menjamin tersedianya lembaga PAUD yang bermutu sesuai standar pendidikan nasional, sehingga benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan mutu pendidikan pada setiap lembaga PAUD sehingga benar-benar dapat mempersiapkan anak usia dini ke pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu pemerintah secara aktif melakukan pemetaan satuan atau lembaga PAUD untuk mengetahui kelayakan sebagai penyelenggara pendidikan.

Pemetaan mutu dilaksanakan berdasarkan Perdirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu Program dan atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemetaan mutu satuan PAUD merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan lembaga PAUD menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini.

Disamping itu hasil pemetaan mutu juga bermanfaat bagi lembaga PAUD untuk

mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan (diperbaiki) untuk meningkatkan akreditasinya, karena pada dasarnya indikator akreditasi sama dengan indikator yang digunakan dalam pemetaan mutu, yaitu indicator SNP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan yang tugas utamanya melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, turut mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan melalui pelaksanaan tugas dan program-program yang dikembangkan. Salah satu tugas BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yaitu melaksanakan pemetaan mutu pendidikan yang nantinya akan menjadi potret pengembangan penyelenggaraan pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan, dan PAUD di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kenyataannya masih banyak lembaga PAUD belum memahami secara utuh 8 SNP dan belum mampu menerapkan dengan baik dalam pelaksanaan programnya. Visi dan misi yang dirumuskan oleh lembaga PAUD masih bersifat abstrak dan kurang berkorelasi dengan kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu. Selain itu terdapat masalah dengan kejujuran atau objektivitas dalam pengisian instrumen pemetaan mutu. Hasil data pemetaan mutu belum mencerminkan kenyataan lembaga PAUD yang sesungguhnya. Sikap kompromi dan pertimbangan subyektif masih berbicara dalam kegiatan pemetaan mutu.

Banyak lembaga PAUD masih enggan melakukan pemetaan mutu dikarenakan

kurang memiliki motivasi dalam melakukan evaluasi diri serta terlalu disibukkan oleh rutinitas yang cukup padat.

Kegiatan pemetaan mutu dipandang sebagai beban yang memberatkan, apalagi belum ada penghargaan yang jelas dari pemerintah bagi lembaga PAUD yang telah berhasil melaksanakan program yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Disisi lain hasil data mutu pendidikan PAUD belum dijamin akurasi, kelengkapan serta belum dikelola dengan baik sehingga belum dapat digunakan untuk perumusan kebijakan, program, dan penganggaran pendidikan. Monitoring dan evaluasi internal di setiap lembaga PAUD belum berjalan optimal sehingga belum menghasilkan data dasar untuk perbaikan mutu berkelanjutan.

Dari masalah-masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Pemetaan Mutu (Perdirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud No. 1 Tahun 2016) Lembaga PAUD di BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan ?
2. Bagaimana kendala pemetaan mutu lembaga PAUD di kota Medan ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Untuk mengetahui pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor kendala pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya mutu pendidikan.

2. **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Kantor BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.

3. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

##### 2.1.1. Pemetaan Mutu

Menurut Perdirjen PAUD dan Dikmas (2016:6) bahwa mutu adalah ukuran yang menggambarkan baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Deming seorang pakar pendidikan mengartikan mutu sebagai kesesuaian dengan kebutuhan. Sedangkan menurut Duran (juga seorang pakar pendidikan menyatakan mutu ialah kecocokan dengan kebutuhan. Dengan demikian, mutu adalah gambaran mengenai kesesuaian, kelayakan, kemanfaatan, kebermanfaatan suatu objek dengan kebutuhan atau kepentingan seseorang atau kelompok orang. Pemetaan merupakan upaya untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan/atau mengklasifikasi suatu objek menurut kriteria tertentu. Apabila mutu dijadikan indikator pemetaan, maka hasil pemetaan dapat diklasifikasi mulai dari sangat bermutu sampai sangat tidak bermutu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pemetaan mutu program dan/atau satuan PAUD dan Dikmas merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan menurut SNP. Parameter kelayakan ini adalah indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF yang meliputi delapan standar. Makin sesuai dengan indikator-indikator tersebut, Satuan PAUD dan Dikmas makin layak sebagai penyelenggara program pendidikan Nonformal

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (3), pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dalam hal ini penjaminan mutu dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP). Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tentang lingkup standar nasional meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sementara ayat 2 menyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Kementrian Pendidikan dan Budaya (2016: 21) menjelaskan, pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, seperti: kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orangtua, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap personel tersebut memiliki peran sesuai posisi masing-masing.

Lebih lanjut Kementrian Pendidikan dan Budaya (2016:21) menjelaskan, langkah-langkah yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil. Satuan pendidikan menyusun instrumen mencakup seluruh standar beserta indikator dari masing-masing standar. Penyusunan instrumen ini akan membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pemetaan mutu. Dalam menyusun instrumen harus memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik. Pengumpulan data bukti yang sistematis dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Tahap pengumpulan data menurut Nanang Fattah (2012: 21-22) dapat dilakukan satuan pendidikan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi cara pengisian alat Evaluasi Diri Satuan pendidikan oleh pengawas dan Kepala Satuan pendidikan kepadasiswa satuan pendidikan.
- 2) Melakukan pengisian EDS dengan standar acuan SPM dan/atau SNP.
- 3) Menelaah hasil pengisian dengan cara diskusi seluruh komponen pada satuan pendidikan yang bersangkutan agar diperoleh data yang akurat.
- 4) Mengumpulkan hasil pengisian instrumen untuk diolah.

Setelah data bukti terkumpul, satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan terhadap SNP. Dalam analisa data yang dapat dilakukan satuan pendidikan adalah sebagai berikut (Nanang Fattah, 2012:22):

- 1) Mengecek kebenaran data dilengkapi dengan bukti-bukti mutakhir, juga fakta yang ada pada satuan pendidikan.
- 2) Mengolah data dengan cara sesuai dengan indikator dan kategori yang terdapat pada EDS.
- 3) Merangkum data hasil kategorisasi menjadi deskripsi kondisi satuan pendidikan.
- 4) Menganalisis hasil pengolahan dengan mengacu pada rubrik EDS sehingga diperoleh hasil tentang kedudukan satuan pendidikan sesuai dengan capaian SPM dan /atau SNP.
- 5) Hasil analisis berupa ketercapaian standar acuan mutu satuan pendidikan, apakah belum atau sudah memenuhi SPM, apakah sudah mencapai atau melampaui SNP.

Hasil analisa data bukti menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari EDS sebaiknya disajikan secara singkat namun informatif (Kemdikbud, 2016:29).

Salah satu alat untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan tersebut adalah evaluasi diri sekolah (EDS). Sedangkan dalam pasal 92 ayat 8 PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Pemetaan mutu memiliki peranan strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan satuan serta penyelenggaraan pelayanan dan pembelajaran bidang PAUD dan Dikmas. Selain itu, pelaksanaan supervisi pendidikan serta pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi pengelolaan satuan PAUD dan Dikmas harus didasarkan pada hasil pemetaan mutu. Oleh karena itu, pemetaan mutu harus dilaksanakan melalui prosedur yang baik dan benar. Sekurang-kurangnya, pemetaan mutu dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pertama

Tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pembentukan tim inti berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT dengan susunan sebagai berikut:
  - 1). Kepala UPT sebagai penanggung jawab;
  - 2). Kepala Bidang sebagai koordinator;
  - 3). Kepala Seksi sebagai pengendali pelaksanaan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)21/8/23

- 4). Salah satu staf seksi sebagai sekretaris;
  - 5). Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai bendahara; dan
  - 6). Beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap UPT.
- b. Pelaksanaan koordinasi internal tim inti untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemetaan mutu program dan/atau satuan PAUD dan Dikmas.
- c. Simulasi penggunaan perangkat pemetaan mutu program dan/atau satuan PAUD dan Dikmas (pengisian instrumen pemetaan mutu, masukan (input) data hasil pemetaan mutu, dan/atau cara menganalisis data hasil pemetaan mutu)) yang diikuti oleh seluruh anggota tim inti.
- d. Pelaksanaan koordinasi antara tim inti dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pemetaan mutu program dan/atau satuan PAUD dan Dikmas seperti penentuan sasaran atau objek pemetaan mutu, serta sumber daya manusia yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan pemetaan mutu.
- e. Pembentukan Tim Pelaksana Pemetaan Mutu yang berasal dari berbagai elemen atau institusi seperti Pamong Belajar, Penilik, Pimpinan SKB, Kabid/Kasi di Dinas Pendidikan.

## 2. Tahap Kedua

Tahap ini mencakup beberapa kegiatan, seperti:

- a. Pelaksanaan orientasi atau pembekalan bagi anggota Tim Pelaksana Pemetaan Mutu satuan PAUD dan Dikmas.

- b. Pembagian tugas yang berkaitan dengan tempat, satuan PAUD dan Dikmas sebagai objek atau sasaran, dan penentuan waktu pelaksanaannya.
- c. Pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas atau pengumpulan data dan informasi sesuai dengan butir-butir yang tertuang dalam instrumen pemetaan mutu.
- d. Pengisian (input) data hasil pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas secara daring (*online*).
- e. Verifikasi data (*checking*) pada sistem online yang telah diinput oleh para pelaksana pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas.

### 3. Tahap Ketiga

Tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Analisis data hasil pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh tim inti berdasarkan indikator-indikator SNP yang dirumuskan oleh BAN PAUD dan PNF.
- b. Pemaparan hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh tim inti.
- c. Pembahasan hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas oleh peserta dari berbagai elemen pemangku kepentingan.
- d. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hasil analisis data maupun tindak lanjut yang layak atau harus dilaksanakan.
- e. Penyusunan laporan hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas secara lengkap.

- f. Distribusi hasil analisis data pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### 4. Tahap Keempat

Tahap ini terdiri atas beberapa kegiatan yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ditentukan Kepala UPT dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, di antaranya:

- a. Supervisor pendidikan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan;
- d. Pendampingan;
- e. Fasilitasi;
- f. Akreditasi.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Di tahun 2019 Satuan Pendidikan PAUD yang belum Akreditasi Sekolah, diharuskan untuk melakukan pengisian Pemetaan Mutu Pendidikan PAUD serta SISPENPAUD.

### 2.1.2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

#### 2.1.2.1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan sejak dini, yang paling utama

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai kelanjutannya. Potensi anak akan

berkembang sangat pesat yakni antara umur 0 sampai dengan 6 tahun, disitulah pentingnya pendidikan usia dini karena umur tersebut adalah periode usia emas (golden age). Pendidikan di sekolah bagi anak usia dini memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut fisik motorik halus dan kasar, kecerdasan, sosio emosional bahasa dan komunikasi, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Apriana (2014:3) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Anak usia dini adalah anak yang berusia nol tahun atau sejak lahir sampai berusia kurang lebih delapan tahun (0-8). Sedangkan definisi yang kedua, menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dari pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia nol sampai 6 atau 8 tahun yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

Kartono (2010:6) mendeskripsikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut:

1) Bersifat egoisantris naif

Anak memandang dunia luar dari pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Maka anak belum mampu memahami arti sebenarnya dari suatu peristiwa dan belum mampu menempatkan diri kedalam kehidupan orang lain.

2) Relasi sosial yang primitif

Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egoisantris naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap benda-benda atau peristiwa yang sesuai dengan daya fantasinya. Anak mulai membangun dunianya dengan khayalan dan keinginannya sendiri.

3) Kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan

Anak belum dapat membedakan antara dunia lahiriah dan batiniah. Isi lahiriah dan batiniah masih merupakan kesatuan yang utuh. Penghayatan anak terhadap sesuatu dikeluarkan atau diekspresikan secara bebas, spontan dan jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun pura-pura, anak mengekspresikannya secara terbuka karena itu janganlah mengajari atau membiasakan anak untuk tidak jujur.

#### 4) Sikap hidup yang fisiognomis

Anak bersikap fisiognomis terhadap dunianya, artinya secara langsung anak memberikan atribut atau sifat lahiriah atau sifat konkrit, nyata terhadap apa yang dihayatinya. Kondisi ini disebabkan karena pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya masih bersifat menyatu (totaliter) antara jasmani dan rohani. Anak belum dapat membedakan antara benda hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada disekitarnya dianggap memiliki jiwa yang merupakan makhluk hidup yang memiliki jasmani dan rohani sekaligus, seperti dirinya sendiri.

Pendidikan Anak Usia Dini di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 disebutkan sebagai upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada pasal 28 ayat 1 dinyatakan pula bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal (ayat 2). Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak, (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat (ayat 3) sedangkan ayat 4 mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Standar Pendidikan Anak Usia Dini ini selain mengikuti undang-undang

dan peraturan pemerintah diatas, juga mengikuti Permendikbud No. 137 tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2014 tentang Standar Nasional PAUD yang menggantikan Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang standar PAUD dan mengikuti Permendikbud No.146 tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Nasional. Keluarnya Permendikbud No. 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan di Indonesia yang bisa disebut sebagai Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), maka satuan ini juga dimasukkan di dalam sasaran akreditasi pelaksana akreditasi PAUD dan PNF. Peraturan ini dilihat sebagai aturan tambahan di dalam akreditasi satuan pendidikan PAUD, khusus untuk SPK.

Dengan kondisi diatas maka akreditasi satuan pendidikan PAUD menggunakan instrumen akreditasi untuk PAUD, untuk akreditasi PAUD-SPK menggunakan instrumen gabungan yang merupakan instrumen akreditasi untuk PAUD serta Instrumen tambahan pendukung.

Dengan penjelasan diatas maka sasaran akreditasi PAUD adalah bentuk satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

### **2.1.2.2. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Menurut Iva (2014:3) tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kerangka dasar kurikulum pendidikan anak usia dini adalah kerangka dasar yang dijadikan sebagai acuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengembangkan kurikulum tingkat

satuan pendidikan. Sedangkan sasarannya adalah lembaga-lembaga penyelenggara PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal, seperti taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD yang sejenis.

Secara spesifik, ada dua tujuan diselenggarakannya PAUD, tujuan utama dan tujuan penyerta. a) Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar dan dalam mengarungi kehidupan di masa dewasa. b) Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

PAUD sangatlah penting untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan antara lain: a) Alasan pendidikan, PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah; b) Alasan ekonomi, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah; c) Alasan sosial, PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan; dan d) Alasan hak/hukum, PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Pendidikan dalam sangat dibutuhkan oleh para orang tua ataupun guru guna membimbing anak didiknya supaya lebih berkualitas dan berkarakter. Pendidikan tersebut juga terdapat ruang lingkup yang mendasari guru dalam membimbing muridnya yaitu memberikan pendidikan keimanan, memberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pendidikan yang berakhlak, memberikan pemahaman di bidang intelektual, memenuhi pendidikan fisik, serta memberikan kebutuhan psikis.

Ruang lingkup pendidikan anak secara garis besar dibagi menjadi lima, yaitu: a) Pendidikan keimanan; b) Pendidikan akhlaka; c) Pendidikan intelektual yang disesuaikan dengan kemampuan berpikir anak; d) Pendidikan fisik yaitu dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberi waktu tidur dan aktivitas yang cukup agar pertumbuhan fisiknya baik dan mampu melakukan aktivitas; dan e) Pendidikan psikis yaitu dalam melaksanakan pendidikan psikis terhadap anak antara lain: (a) Memberikan kebutuhan emosi, dengan cara memberikan kasih sayang, pengertian, berperilaku santun dan bijak; (b) Menumbuhkan rasa percaya diri; dan (c) Memberikan semangat tidak melemahkan.

### **2.1.3. Mutu Pendidikan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang sedang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dewasa ini. Menurut Sallis (1993) dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2017:295)

bahwa mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi yang ditentukan secara sepihak, yakni oleh produsen (jasa atau barang). Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mutu adalah ukuran untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal berupa standar ideal yang ingin dicapai oleh suatu proses.

Sedangkan definisi pendidikan dalam Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Selanjutnya dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI disebutkan bahwa pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Keinginan kuat pemerintah memperbaiki mutu pendidikan tidak hanya ditunjukkan dengan undang-undang saja melainkan penyiapan anggaran untuk kesejahteraan guru dan dosen, berbagai program dan pelatihan guru serta investasi jangka panjang dengan menyediakan, membangun dan memperbaiki sarana prasarana pendidikan.

Menurut Supriadi (2018:10) pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pendidikan itu terjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melalui pengaruh dari seseorang yang telah dewasa kepada orang yang belum dewasa. Dalam hal ini pendidikan ialah semua usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan yang diberikan harus tertuju kepada anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Pengertian mutu pendidikan, merupakan suatu konsep yang bisa berkembang seiring dengan tuntutan kebutuhan hasil pendidikan, yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mutu pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.

Dalam konteks menurut Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana dikutip Mulyasa (2011:206) bahwa pengertian mutu mencakup input, proses, dan output. Konsepsi input dan output pendidikan sejauh ini merupakan gambaran mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Mutu pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksana pendidikan, karena perangkat pelaksana pendidikan memiliki lingkup kegiatan langsung berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Menurut Suryadi (2011:299), mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam dua dimensi yaitu kemampuan teknis dan pengelolaan. Menurut Umiarso dan Gojali (2011:124), mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/ standaryang berlaku.

Menurut Sallis dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2017:299) bahwa mutu pendidikan merupakan fungsi dari dari proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan, peran serta guru, peran serta siswa, manajemen, organisasi, lingkungan fisik dan sumberdaya, kepuasan pelanggan sekolah, dukungan input dan fasilitas, dan budaya sekolah. Optimalisasi dari masing-masing komponen ini menentukan mutu sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan.

Menurut Danim (2012:53) bahwa mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, iuran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketentuan, dan cita-cita. Mutu pendidikan difokuskan kepada mutu proses pendidikan. Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini mencakup sejumlah unsur utama yang mendasar yang membentuk mutu kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dana, manajemen dan evaluasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dengan demikian, pengertian tentang mutu pendidikan adalah tingkat atau taraf atau derajat kemampuan dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku.

### 2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sedangkan sekolah terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen persekolahan, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki jaringan langsung atau tidak terhadap dunia pendidikan. Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, pemerintah, masyarakat, sekolah, orangtua dan siswa itu sendiri. Menurut Maslikhah (2012:889), ada empat faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu: Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan kurang melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Kedua, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Ketiga,

Document Accepted 21/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Profile (repository.uma.ac.id)21/8/23

masyarakat seringkali diberlakukan sebagai komunitas untuk melegalkan sebuah kebijakan pelaksana pendidikan, dan bukan sebagai pelaku untuk memberdayakan sekolahnya. Keempat, evaluasi pendidikan seringkali dibelokkan dengan kepentingan tertentu.

Menurut Isjoni (2013:22), pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan kepada beberapa sektor yang merupakan kebutuhan mendasar karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan diantaranya yaitu: Pertama, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, WC guru dan murid. Kedua, sarana dan prasarana pembelajaran, berkaitan dengan pengadaan alat dan media pembelajaran, untuk bidang IPA, IPS, Bahasa, dan bidang lainnya, seperangkat alat praktek laboratorium, pengadaan buku-buku perpustakaan, dan sebagainya. Ketiga, pembangunan SDM, kualifikasi pendidikan guru. Keempat, Pembangunan sektor pendidikan luar sekolah. Kelima, pembangunan life skill.

Menurut Sidi (2011:74), ada lima langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan:

- a. Pembinaan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal.
- b. Peningkatan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- c. Penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah.
- e. Penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan koperatif antar sekolah.

Dari semua pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas dapat penulis simpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan menitikberatkan kepada pengembangan komponen-komponen yang ada dalam satuan pendidikan dan pembangunan mutu secara keseluruhan mulai dari pemerintah, sekolah dan masyarakat atau stakeholder pendidikan, agar dalam proses peningkatan mutu pendidikan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan baik dari aparatur pemerintah maupun satuan pendidikan itu sendiri. Faktor penentu atas keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan juga ditentukan atas kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana guru akan mengajar lebih efektif, dan hasil belajar anak didiknya baik, kalau sarana pembelajaran dalam kelas tidak tersedia. Ini jelas akan menjadi kebijakan pemerintah karena itu tugas pemerintahlah untuk menyediakan sarana pembelajaran di kelas yang diperlukan guru. Seperangkat pembelajaran tersebut sangat menentukan dalam mewujudkan mutu pendidikan.

### **2.1.3.3. Standar Mutu Pendidikan**

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah

ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017:3) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

### 1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan dapat dikatakan sebagai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati, sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

### 2. Standar Isi

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi

dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

### 3. Standar Proses

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Artinya, pertama, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti standar proses pendidikan dimaksud berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di mana pun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran seperti yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan ini.

Kedua, standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, standar proses pendidikan dimaksud dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran.

Ketiga, standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu, sebenarnya standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

#### 4. Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

#### 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

#### 7. Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

## 8. Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

### 2.1.4. Peningkatan Mutu Pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peningkatan mutu pendidikan pada anak usia dini tergantung dari faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mencapainya. Faktor pendukung yaitu antara meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, sehingga mereka tidak keberatan menitipkan anaknya pada TPA maupun KB walaupun dengan biaya yang cukup mahal, hal ini didukung juga gencarnya pemerintah dengan mensosialisasikan melalui dinas pendidikan dengan

pada lembaga PAUD, sehingga diharapkan lembaga PAUD dapat memberikan layanan yang optimal.

Faktor penghambat, meliputi keterbatasan dana yang dimiliki, kurangnya sarana dan prasarana, serta rendah dan keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini khususnya pada masyarakat pedesaan sehingga untuk mengatasinya karena keterbatasan dana dengan minta donator dari masyarakat, melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan melalui program pengayaan maupun mengikutsertakan pengelola maupun pendidik dalam berbagai pelatihan maupun workshop pendidikan anak usia dini (Hiryanto, dkk., 2010:12).

Guna menghasilkan mutu, terdapat empat usaha yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, yaitu: a) Menciptakan situasi “menang-menang” (*win-win solution*) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang berkepentingan dengan lembaga pendidikan (*stakeholders*); b) Perlu ditumbuh kembangkan motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu; c) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang; d) Menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu (Slamet dalam Bresman, 2012:79).

Menurut Faiq (2011:6) peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui berbagai cara, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, atau dengan memberikan

kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan nonpembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan PAUD adalah menggunakan sarana bermain dalam bentuk edukatif. Sarana bermain dalam bentuk Alat Permainan Edukatif (APE), sebagai sarana yang berfungsi membantu pamong dalam menciptakan situasi pembelajaran serta merangsang dalam pembentukan perilaku tertentu.

Hampir semua taman penitipan anak maupun kelompok bermain telah memiliki alat permainan edukatif walupun dilihat dari jumlah dan jenisnya masing-masing lembaga sangat bervariasi, hal ini tergantung dari kemampuan lembaga tersebut, ada yang sangat lengkap, tetapi ada juga yang masih sangat terbatas. Termasuk juga ketersediaan sarana/prasarana pendukung lainnya seperti ruang belajar, ruang bermain dan perlengkapan lainnya juga sangat bervariasi (Hiryanto, dkk., 2010:9).

Pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dapat diukur dengan membandingkan hasil pencapaian program dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Komponen input, proses dan output, lembaga pendidikan anak usia dini dikatakan bermutu apabila aktivitas pelayanan yang dilakukan betul-betul mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan mendayagunakan input-input yang ada secara terpadu, harmonis dan optimal.

Standar ini diantaranya meliputi kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen serta lingkungan pendukung dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)21/8/23

pembiayaan, dengan kata lain layanan PAUD bermutu manakala dapat memenuhi Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Hiryanto, dkk., 2010: 10-11).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Afirista Alviana Dewi (2018) dengan judul Pemetaan Mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017, diperoleh hasil bahwa capaian mutu pendidikan nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 belum memenuhi SNP yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: (1) Capaian mutu PAUD dan PKBM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dikategorikan menuju SNP level 3, sedangkan capaian mutu LKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dikategorikan menuju SNP level 2. (2) Capaian mutu PAUD yang paling baik standar proses dan capaian mutu yang paling rendah standar pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Capaian mutu yang paling baik pada PKBM adalah standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah standar sarana dan prasarana. (4) Capaian mutu yang paling baik LKP adalah standar kompetensi lulusan (SKL) dan capaian mutu yang paling rendah standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Penelitian Hiryanto, dkk (2010) dengan meneliti pemetaan tingkat pencapaian mutu pendidikan PAUD Yogyakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, dilihat dari pencapaian mutu pendidikan anak usia dini, maka dengan menggunakan Standar Manajemen Minimal (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) serta Standar Pelayanan Minimal,

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di kota Yogyakarta cenderung lebih baik

Document Accepted 21/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)21/8/23

dibanding dengan yang ada di kabupaten Bantul, terutama dalam tenaga kependidikan. Hal ini dapat diketahui dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini sehingga mereka tidak keberatan menitipkan anaknya pada Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun Kelompok Bermain (KB) walaupun dengan biaya yang cukup mahal, hal ini didukung juga gencarnya pemerintah mensosialisasikan melalui dinas pendidikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk pengelola maupun tenaga pendidik pada lembaga PAUD.

Penelitian Nanik Irianwati (2013) yang berjudul Kegiatan Peningkatan Mutu Pusat Sumber Belajar Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal dan Penilaian dalam Pembelajaran Anak Usia Dini, diperoleh hasil bahwa Dalam bidang pendidikan, penilaian menyangkut seluruh aspek perkembangan anak, yaitu motorik, temperamen, bahasa, kognitif dan sosial emosional. Prinsip penilaian pendidikan anak usia dini antara lain menyeluruh, berkesinambungan, obyektif, otentik, edukatif dan bermaknaan. Mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai anak. Menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan setiap anak. Mengetahui efektivitas materi atau konsep pembelajaran, metode, sumber belajar dan media untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran. Mengetahui efektivitas materi atau konsep pembelajaran, metode, sumber belajar & media untuk pencapaian proses & hasil pembelajaran. Prinsip dasar evaluasi perkembangan anak antara lain bermanfaat untuk anak, memiliki tujuan khusus yang jelas, memahami kemungkinan keterbatasan implementasi penilaian dan evaluasi pada anak, sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

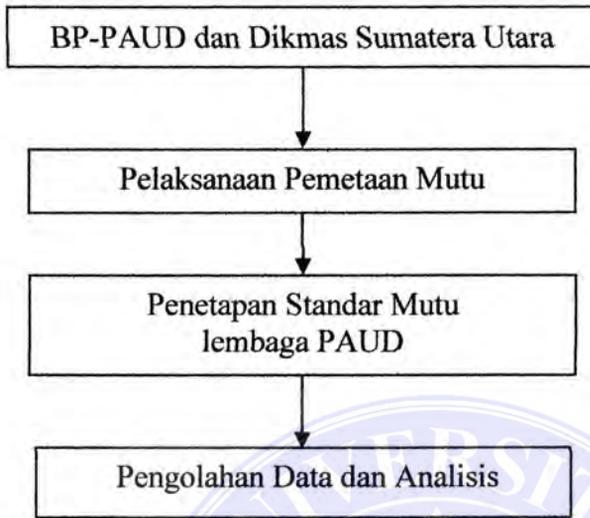
Access From (Repository.uma.ac.id) 21/8/23

dengan usia anak, terdapat kesesuaian dengan budaya anak, dan bernilai bagi orangtua. Aspek yang dinilai adalah keseluruhan aspek perkembangan anak yang mencakup perkembangan nilai-nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, bahasa dan fisik-motorik.

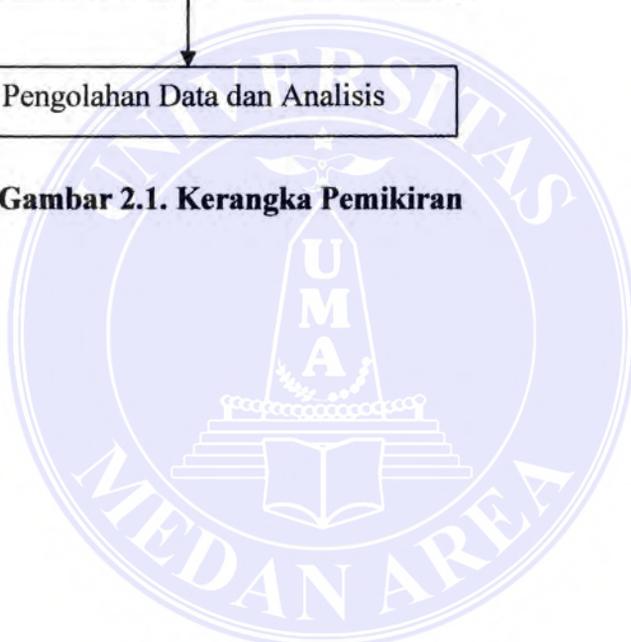
### 2.3. Kerangka Pemikiran

Pemetaan mutu dilaksanakan berdasarkan Perdirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat No. 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu Program dan atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pemetaan mutu satuan PAUD merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kelayakan lembaga PAUD menurut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pemetaan mutu bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini. Disamping itu hasil pemetaan mutu juga bermanfaat bagi lembaga PAUD untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan (diperbaiki) untuk meningkatkan akreditasinya, karena pada dasarnya indikator akreditasi sama dengan indikator yang digunakan dalam pemetaan mutu, yaitu indikator SNP.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, dengan alamat Jl. Kenanga Raya No.64, Tj. Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yakni memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti (Sugiyono, 2012:39).

#### 3.3. Informan Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2010:132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan Prastowo (2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi

Sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang

yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan informan menurut Lincoln dan Guba Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:132) yaitu sebagai berikut:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010:172) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* yaitu:

1. Dra. Suriatanti Supriyadi, M.Si selaku Kasubbag Umum pada BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
2. Arie Santi Siregar, M.Kom selaku koordinator pemetaan mutu pada BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
3. Pamong Belajar selaku pelaksana pemetaan mutu BP PAUD dan Dikmas

Dan sebagai informan tambahan adalah lembaga PAUD yang ada di Kota Medan.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara.

#### 2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Masyarakat Kemdikbud No 1 Tahun 2016) Dalam Akreditasi Lembaga PAUD di BP-PAUD dan Dikmas Analisis Program Pemetaan Mutu (Perdirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Medan).

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan

kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini kegiatan analisis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan pentingnya program pemetaan mutu dalam akreditasi lembaga PAUD. Menurut Muslich, (2009:41) yang dimaksud dengan analisis data adalah “pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul”.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

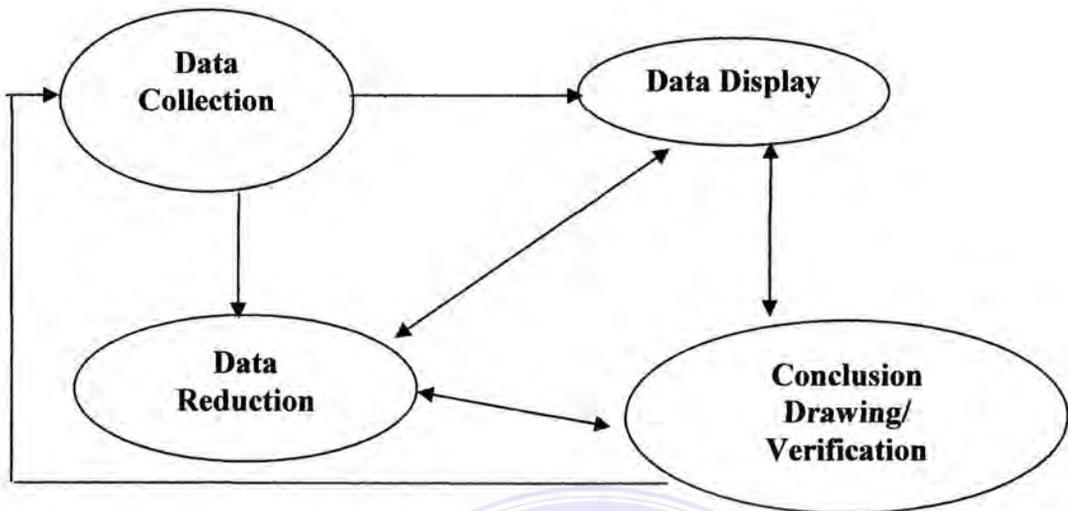
Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini :



**Gambar 3.1. Komponen Dalam Analisis Data**

Sumber: Sugiyono (2012:431)

### 3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan.
2. Mutu adalah ukuran yang menggambarkan baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).
3. Pemetaan adalah upaya untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan/atau mengklasifikasi suatu objek menurut kriteria tertentu.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah tahap pemetaan mutu

Berdasarkan Perdirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kemdikbud No. 1 Tahun 2016, yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Tahap I : Pembentukan Tim dan Pelaksanaan Koordinasi
- Tahap II : Pengumpulan Data (Informasi)
- Tahap III : Analisis dan Pelaporan Hasil Pemetaan Mutu
- Tahap IV : Tindak Lanjut Laporan



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan oleh BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara belum dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil pemetaan tidak dapat benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar untuk meningkatkan mutu lembaga PAUD. Disamping itu rekomendasi sering sulit dilaksanakan sehingga hasil pemetaan mutu kurang memberikan manfaat secara maksimum terhadap pengembangan mutu pendidikan lembaga PAUD di Kota Medan.
2. Faktor kendala pemetaan mutu lembaga PAUD di Kota Medan adalah: Koordinasi dalam tim inti cenderung berjalan dengan lambat dan kurang lancar, informasi yang dikumpulkan dari lapangan oleh tim pelaksana pemetaan mutu sering ditemukan kejanggalan-kejanggalan atas informasi, pembahasan terhadap hasil pemetaan mutu tidak selalu dapat menghasilkan rekomendasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi lembaga PAUD, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dari hasil pemetaan mutu tidak selalu dapat dilakukan dengan baik karena setiap rekomendasi membutuhkan biaya untuk melaksanakannya.

## 5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap anggota tim pemetaan mutu menyadari pentingnya pelaksanaan koordinasi agar dapat mengatur jadwal secara lebih baik untuk melakukan pertemuan secara rutin antar anggota tim, sehingga setiap anggota dapat menyatukan persepsi atas tugas-tugas yang diperlukan dalam pemetaan mutu lembaga PAUD.
2. Sebaiknya tim pelaksana pemetaan mutu perlu menyediakan waktu yang lebih banyak dalam proses pengumpulan data agar setiap data yang diperoleh dari lembaga PAUD dapat dibuktikan kebenarannya.
3. Sebaiknya tim pemetaan mutu berupaya melakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan mengumpulkan semua informasi yang masih kurang tersedia sehingga setiap kendala dapat diberi rekomendasi.
4. Sebaiknya lembaga PAUD bersama dinas pendidikan bekerjasama dengan baik untuk dapat melaksanakan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan mutu lembaga PAUD.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. 2012. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Isjoni. 2013. *Pembelajaran Kooperatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Indikator Mutu Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Pemetaan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Maslikhah. 2012. *Quovadis pendidikan Multikultur*. Surabaya: JP BOOK kerjasama dengan STAIN salatiga.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mujamil Qomar. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: Gelora AksaraPratama.
- Muslich, M. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prastowo. 2011. *Motode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sidi. 2011. *Pemimpin dan Kepimimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmedia.
- Marsudi, Saring. 2006. *Permasalahan Dan Bimbingan Di Taman Kanak-Kanak*. Surakarta: UMS. Tidak diterbitkan.
- Kartini Kartono. 2010. *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyasa. 2011. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/23

Supriadi. 2018. *Kapabilitas Pemimpin Demokratis Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Tim Dosen Adminisrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Umiarso dan Gojali.2010. *Pendidikan Kepemimpinan Islam Antara Teori. Dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

### **Peraturan-peraturan:**

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknik Pemetaan Mutu Program dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013

### **Jurnal/Internet:**

Dewi, Afirista Alviana. 2018. Pemetaan Mutu Pendidikan Nonformal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*.

Rohmad Sodiq. 2017. *Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang*. Diakses dari [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id).

Sustiwi, Patna. 2016. Keefektifan Penjaminan Mutu Standar Proses Di SdnKaliurang 2 Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman. Diakses dari [journal.uny.ac.id](http://journal.uny.ac.id).